

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Alfian Mushafy. *“Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasn Perekonomian Modern.”* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Abdullah, Karimuddin, Misbahul Jannah, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadilla, Taqwin, Nanda Saputra, Ketut Ngurah Ardiawan, and Meilida Eka Sari. *“METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF.”* Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Alfionita, Linda. *Jurnal Agama, Social, Dan Budaya* 2, no. 2 (2022).
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam.* PT Darul Falah, 2006.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arake, L. *Hadist-Hadist Politik Dan Pemerintahan.* Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.
- Arrafi, Muhammad Alif, M Angga Aditya, Muhammad Syahreza Fahlifi, Rizal Faqrul Rohman, and Zidhan Raihan Ramadhani. *“ETIKA, MORAL, DAN AKHLAK.”* *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 2 (2023).
- Asshiddiqie, Jimly. *Mekanisme Pelanggaran Kode Etik Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kode Etik.* Jakarta, 2017.
- . *Outlook 2016 Refleksi Dan Proyeksi.* Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2016.
- As-shiddiqiey, T.M Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asshidiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Asshidiquie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi Republik Indonesia, n.d.
- Azimi, M. M. *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Chakim, Lutfi. *Jurnal Tentang Desains Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*, Mei 2023.
- Chakim, M. Lutfi. “*Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Lembaga Etik*.” *Jurnal Konstitusi*, no. 2 (June 2011).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darwis, Muh. Salman. “*Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (March 2015).
- Depdikbud,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Djazuli,. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Media Group, 2009.
- Djazuli, A. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- dkpp.go.id. “*Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*,” 2017. <https://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>.
- Ersan, E. “*Peran Wilayah Al-Hisbah Dalam Hukum Islam*.” SKRIPSI, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Fadlian, Aryo. “*Pengaruh Putusan DKPP Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014*.” *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (Oktober-Desember 2016).

- Furqani, Hafas. "Beberapa Catatan Tentang Wilayahul Hisbah," 2007.
www.acehinstitute.org/opini_25-0407.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang." Makalah, Universitas Airlangga, n.d.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia, n.d.
- Irwantoni. "Peran Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Jurnal Al Adalah X* (January 3, 2012).
- Jaelani, Imam Amrusi, and dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha Fi al-Islam (terj) Imran AM*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- marbawi, M. Idris Abd. Rauf al-. *Kamus Marbawi*. Darul fikri, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasef, M. Imam. "Studi Kritis Mengenai Kewenangan DKPP Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (July 2014).
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum., n.d.
- Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu., n.d.

“Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” n.d.

Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum., n.d.

Pasal 6 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum., n.d.

Pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum., n.d.

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, n.d.

Pasal 29 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum, n.d.

Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum, n.d.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, n.d.

“Pasal 159 Ayat (1) Dan(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.,” n.d.

Pasal 463 ayat (1), (3), dan (4) UU Pemilu, n.d.

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, n.d.

Peraturan bersama KPU,BAWASLU,DKPP pasal 17 nomor 2 tahun 2012, n.d.

Peraturan DKPP Nomor 2 pasal 4 Tahun 2017, n.d.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

———. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Cetakan Ke-5*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

- Pulungan, Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah : Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Cet. I, 1994.
- Rahayu, Susi Dian. "Modus Kelalaian Kerja Dalam Proses Pemilu (Sloppy Work of Electoral Process) Oleh Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Etika Dan Pemilu* 4, no. 1 (June 2014).
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Salinan Putusan DKPP*. Jakarta: Sidang DKPP, 2024.
- Saputro, Kustianto Adi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)." Skripsi, 2018.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB (Lembaga Pendidikan Anak Bangsa, 2015).
- Sekartadi, Lalu Kukuh. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/DKPP-PKEII/2013)." *Jurnal IUS* 3, no. 8 (Agustus 2015).
- Setiardi, A. Gunawan. *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Membangun Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Siyasah, Dzajuli Fiqh. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudy. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sukamto. "Kontekstualisasi Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Prasepektif Maqashid Syariah." *Jurnal Malia* 1, no. 7 (February 2016).

- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Cet II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suyuthi, Jalaluddin al-. *Tarikh Khulafa' al- Rasyidin*. Beirut: Dar al-Fikr, T.th, n.d.
- Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Pro Justici*, no. IV (2000).
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- "Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum.," n.d.
- Undang-undang nomor 7 pasal 3 tahun 2017, n.d.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.